

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agoes, Eddy R. (2005). *Laporan Akhir Tim Analisis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yurisdiksi dan Kompetensi Mahkamah Pelayaran*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Black, Henry Campbell. (1990). *Black's Law Dictionary* Edisi VI. Paul Minnesota: West Publishing
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches 4th Edition*. California: Sage Publishing
- Friedman, M Lawrence. (1984). *American Law: An Introduction*. New York: W.W: Norton and Co
- Gouillart, Francis J & James N Kelly. (1995) *Transforming The Organization*. New York: McGraw-Hill Inc
- Hardani, H. A, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group
- Irham, Fahmi. (2015). *Manajemen Strategis*. Bandung: CV Alfabeta
- Kraska, James and Raul Pedrozo. (2013). *International Maritim Security Law*. Leiden-Boston: Martinus NIJHOFF Publisher
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1987). *Bunga Rampai Hukum Laut*. Jakarta: Bina Cipta
- Mahkamah Agung RI. (2010). *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Mahkamah Agung RI
- Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (3th ed). California: SAGE Publication, Inc

- MK, Anshary. (2017). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: CV Mandar Maju
- Moleong, Lexy. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mujahiddin, Ahmad. (2007). *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- O'Brien, Rory. (1998). *An Research of the Methodological Approach of Action Research*. Faculty of Information Studies: University of Toronto USA
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Sutiyoso, Bambang & Sri Hastuti. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Wardoyo, P. (2011). *6 Alat Analisis Manajemen*. Semarang: Semarang University Press

Jurnal:

- Ansori, Lutfil. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148-163.
- Battistella, Vincenzo. (2017). Maritime Law Courts and Judiciary Creation of law: Effect on Civil Law Courts. Universitat Autònoma de Barcelona dalam <https://ddd.uab.cat> diakses 20 Juni 2021.
- Feld, Barry C. (1991). The Transformation of the Juvenile Court. *Minnesota Law Review*-University of Minnesota Law School: Scholarship Repository

- Feld, Barry. C. (1999). The Transformation of the Juvenile Court—part II: Social Ctructure Race, and the “Crack Down” on Youth Crime. University of Minnesota Law School: Scholarship Repository
- Firdaus. (2014). Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 Nomor 1. 36-52
- Hanggi, Heiner & Fred Tanner. (2005). Promoting Security Sector Governance in the EU’s Neighbourhood. *Challiot Paper* No 80
- Irawan, Bambang. (2019). Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia dan Kekuatan Negara di Era Globalisasi. *Jurnal Bornei Administrator*, 15(3), 237-256.
- Kartika, Shanti Dwi. (2014). Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum. *Negara Hukum*, 5(2), 143-167.
- Khopiatuziadah. (2017). Evaluasi Pengadilan Perikanan dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Perikanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 17-28.
- Makhfudz, M. (2017). Pemerintahan Reformasi Tapi Tidak Reformis. *Adi. Jurnal Hukum*, 8(1), 114-136.
- Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Transformasi Kelembagaan: Menuju Kemenkeu Yang Lebih Baik, Organisasi Kaya Fungsi, dan Semangat Perubahan. *Biro Komunikasi dan Layanan Informasi*.
- Rahmawati, M & Hastuti. (2020). Analisis SWOT dan SWOT Sebagai Landasan dalam Perencanaan Strategis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan di Kabupaten Bandung Barat. *Article: Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)*, 410-415.
- Saptana et al. (2013) Strategi Percepatan Transformasi Kelembagaan GAPOKTAN dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dalam

Memperkuat Ekonomi di Perdesaan. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 10(1), 60-70

Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

Subarkah, Ibnu. (2011). Dilematika Kekuasaan Lembaga Peradilan dan Keadilan dalam Frame Desentralisasi Pemerintahan (Suatu Common Sense). *Jurnal Konstitusi*. IV(1), 131-152.

Utama, Yos Johan. (2007). Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 25-45.

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Widanarto, Agustinus. (2019). Transformasi Manajemen Pemerintahan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, (9)1, 75-94

Internet:

China Maritime Trial. (2019). *Development of China's Maritime Courts and Maritime Trials*. Retrieved from http://encgmt.court.gov.cn/chinamaritimetrial/2019-03/21/c_346935.htm, diakses 26 Januari 2022

CNN Indonesia. (2019). Kapal Tenggelan di Tanjung Priok, Satu Awak Meninggal Dunia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191016132012-20-439997/kapal-tenggelam-di-tanjung-priok-satu-awak-meninggal-dunia>, diakses 31 Agustus 2021

Hananto, Akhyari. (2017). Dikukuhkan di New York Agustus Ini, Inilah Jumlah Resmi Pulau di Indonesia. Retrieved from <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/dikukuhkan->

[di-new-york-agustus-ini-inilah-jumlah-resmi-pulau-di-indonesia](#), diakses 16 Maret 2021

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2018). Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia. Retrieved from <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>, diakses 15 Januari 2022

Paramita, Kartika. (2018). Mahkamah Pelayaran vs Maritime Court: Apakah Indonesia Membutuhkan Pengadilan Maritim?. Retrieved from <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b7a650b8b390/mahkamah-pelayaran-vs-maritime-court-apakah-indonesia-membutuhkan-pengadilan-maritim?page=4>, diakses 16 Maret 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wetboek van Koopenhandel voor Indonesie S.1847:23 (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku II)

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Hak Keuangan Bagi Anggota Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli Pada Mahkamah Pelayaran di Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 tahun 2011 Tentang
Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 tahun 2017 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020
Tentang tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Panel Ahli Mahkamah pelayaran yang Berasal Dari Non Pegawai
Negeri Sipil

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 3 Tahun
2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran

Peraturan Mahkamah Pelayaran Nomor: HK.208/01/XI/MP.2015 Tentang
Prosedur Tetap Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982